

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita : Kabupaten Demak

Halaman 5

Siltap Perades Berpotensi Naik

DEMAK - Sempat naik senilai Rp 4 miliar pada 2017, Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2018 turun. Meski penyusutan ADD 2018 hingga Rp 5,024 miliar dibandingkan 2017, namun tak sedikit pun mengurangi alokasi penghasilan tetap (siltap) bagi perangkat desa (perades).

Pada Lokakarya Perbup Dana Desa dan Raperbup ADD, Kepala Dinpermasdes P2KB Kabupaten Demak Drs H Muhammad Ridwan menyampaikan, adanya penurunan anggaran ADD. Jika pada 2016 ADD dianggarkan Rp 96,662 miliar dan sempat naik pada 2017 menjadi Rp 100,668 miliar, pada 2018 pemda menganggarkan Rp 95,626 miliar untuk ADD.

"Untuk Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan telah dialirkan ke 243 desa di Kabupaten Demak sejak 2015, pada 2018 Kabupaten Demak memperoleh alokasi DD sebesar Rp 229.565.688.000 dan telah ditetapkan dalam Perbup Nomor 9/2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa," ujarnya, Senin (12/3).

Walau ADD disebutkan ada penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun siltap perades 2018 dipastikan tak ada penurunan. Bahkan berpotensi naik, sebab penghitungan mendasar pada PP 47/2015 pasal 81.

Sebagaimana disampaikan Tenaga Ahli P3MD, Agus Santosa, selain digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, ADD dipertuntukan siltap perades. Setiap desa tidak akan sama jumlah penerimaan siltap bagi peradesnya, yang terdiri dari kades, sekdes, dan pamong desa. Sebab penghitungan siltap berdasarkan prosentase total ADD masing-masing.

"Sebagai contoh apabila desa menerima ADD maksimal Rp 500 juta maka anggaran untuk siltap maksimal 60 persen. Jika lebih dari Rp 500 juta hingga Rp 700 anggaran siltap mulai Rp 300 juta atau maksimal 70 persen," kata dia.

Di sisi lain, Bupati HM Natsir mengimbau agar penggunaan ADD maupun DD berlandaskan RPJMD. Selain itu, diinstruksikan agar kades tidak merangkap bendahara desa, sehingga bisa tetap fokus pada tanggungjawab sebagai kepala pemerintahan desa.

Pada saat sama, Sekda dr H Singgih Setyono MMR juga mengimbau pemanfaatan DD dan ADD prioritas pada pengentasan kemiskinan. Hadir pula memberikan pengarahan, Wabup H Joko Sutanto. Sementara peserta yang dihadirkan selain camat dan paguyuban kades juga BPD. ■ ssi/SR